



PENETAPAN

Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Hultiawati binti Amaq Hultiawati, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Dusun Batu More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Muzhiril Haqqa, SH bin Amaq Amiruddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Lingkungan Hidup, tempat kediaman di Dusun Otak Kokok, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 1999 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0946/AC/2019/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Khozinatul Asror, laki-laki, umur 17 tahun (ikut Penggugat);
- b. Rama Al Aspihani, laki-laki, umur 7 tahun (ikut Penggugat);

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa:

a. Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 7.6 m x 9 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 270 m2 (2.7 are) yang terletak di Dusun Otak Kokok, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PEMDA;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Supidi;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah PEMDA

b. Sebuah pondasi rumah permanen dengan ukuran 11 m x 6 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 160 m2 (1.6 are) yang terletak di Dusun Otak Kokok, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Humairi Ahdi;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Sri Dahim;
- Sebelah Barat : Tanah Seni;
- Sebelah Timur : Tanah Nasrun;

c. Sejumlah uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

Obyek sengketa point 3 huruf a, b dan c mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa pada tahun 2001 Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat berjumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai pembuatan bangunan rumah permanen

Hal. 2 dari 7 Put. No. 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat namun hingga saat ini Tergugat belum memberikan gantinya kepada orang tua Penggugat;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 huruf a, b dan c adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat, dan sengketa point 4 adalah uang hasil pinjaman Tergugat kepada orang tua Penggugat yang sepenuhnya menjadi hak milik orang tua Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada point 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada point 3 huruf a, b dan c diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan obyek sengketa point 4 adalah merupakan uang hasil pinjaman Tergugat kepada orang tua Penggugat yang sepenuhnya menjadi hak milik orang tua Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) obyek sengketa point 3 huruf a, b dan c adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam Tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 Put. No. 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 7 Put. No. 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel dari Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Put. No. 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 1255/Pdt.G/2019/PA.Sel